E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 3649-3664
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Konflik Etno-Religius Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Kabupaten Mamasa

Aco Fikram S[1], Muh. Saiful[2], Syamsul[3]

[1,3]Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhary Mamuju
[2]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: aco_f@yahoo.com, muhsaiful0810@gmail.com, Syamsul.mmj82@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan jenis kualitatif. Pendekatan yang digunakan sosio-historis. Sumber data primer terdiri dari informasi yang diperoleh dari para pemimpin agama dan tokoh masyarakat sebagai saksi peristiwa. Sedangkan sumber sekunder meliputi buku, jurnal, dan bacaan terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan wawancara langsung dengan pelaku dan saksi peristiwa. Metode pengolahan dan analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, yang diakhiri pada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konflik etno-religius di Kabupaten Mamasa bermula dari Tarik ulur pemekaran wilayah. Kedua, konflik ini berkembang menjadi konflik etno-religius yang sarat oleh kepentingan politik antara kelompok pro pemekaran yang diasosiasikan pada etnis Toraja dengan mayoritas pemeluk Kristen dan kontra pemekaran yang diasosiasikan pada etnis Mandar dengan mayoritas pemeluk Islam. Ketiga, konflik ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti instabilitas kemanan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, pengungsian penduduk, hingga representasi politik agama dan etnis pada keterpilihan kepala daerah sebagai resolusi konflik. Penelitian ini bukan hanya sebagai konstruksi sosio-historis pemekaran wilayah Kabupaten Mamsa, juga sebagai refleksi dalam merawat perdamaian guna menumbuhkan kerukunan antar komunitas agama dan kelompok etnis yang beragam di Kabupaten Mamasa.

Kata kunci: *Konflik Etno-Religius, Pemekaran Wilayah, Kabupaten Mamasa*

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 3649-3664
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Abstract

This study is a qualitative historical inquiry employing a socio-historical approach. Primary data sources consist of information obtained from religious leaders and community figures who witnessed the events, while secondary sources include books, journals, and related literature. Data collection methods involved observation and direct interviews with participants and witnesses. Data processing and analysis encompassed data reduction and presentation, culminating in conclusion drawing or verification. The research findings indicate that: First, the ethno-religious conflict in Mamasa Regency originated from a tug-of-war over the issue of regional administrative expansion. Second, the conflict evolved into an ethno-religious dispute heavily influenced by political interests, pitting the pro-expansion faction—associated with the Toraja ethnic group (predominantly Christian)—against the anti-expansion faction—associated with the Mandar ethnic group (predominantly Muslim). Third, the conflict impacted various aspects of community life, ranging from security instability that resulted in casualties and population displacement to the role of religious and ethnic political representation in the election of the regional head as a means of conflict resolution. This study serves not only as a socio-historical reconstruction of the administrative expansion of Mamasa Regency but also as a reflection on maintaining peace to foster harmony among the diverse religious and ethnic communities in the region.

Keywords: *Ethno-Religious Conflict, Regional Administrative Expansion, Mamasa Regency*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi etnis, budaya, bahasa, maupun agama. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan bangsa yang dapat memperkuat persatuan dan integrasi sosial. Namun, dalam kondisi tertentu, perbedaan identitas etnis dan agama juga berpotensi melahirkan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Konflik etno-religius merupakan salah satu bentuk konflik yang muncul akibat perbedaan identitas kelompok yang berkaitan dengan aspek etnis dan agama, sehingga sering kali menimbulkan gesekan horizontal yang berdampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan masyarakat.

Ketika konflik etno-religius terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan pada saat berlangsungnya konflik, tetapi juga meninggalkan berbagai konsekuensi sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat dalam jangka Panjang (LIPI, 2012: 87). Konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antar - golongan (SARA) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling ganas. Menurut Nono Anwar Makarim, jumlah korban jiwa dalam konflik ini lebih besar daripada korban akibat terorisme dan perang antar negara (Tempo, 2003: 82).

Satu dari sekian peristiwa konflik etno-religius yang terjadi di Indonesia ialah di Kabupaten Mamasa pada tahun 2003. Kabupaten Mamasa berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, merupakan daerah yang memiliki karakteristik masyarakat yang plural dengan latar etnis dan agama yang beragam. Dalam perjalanan sejarahnya, wilayah ini pernah mengalami dinamika sosial yang dipengaruhi oleh hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda identitas. Kondisi tersebut diawali dari faktor politik lalu kemudian melebar ke berbagai aspek lain salah satunya muncul sentimen keagamaan yang berkembang di tengah Masyarakat (Mahyuddin dan Muhammad Zaldy Febry, 2023).

Hal di atas sejalan dengan observasi awal peneliti, di mana faktor politik merupakan muara dari konflik ini. Masyarakat terdikotomi atas perbedaan antara kelompok yang pro dan kontra pemekaran. Perbedaan ini semakin diperlebar oleh latar

etnis dan agama masing-masing kelompok.

Kajian mengenai dampak konflik etno-religius menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu peristiwa konflik memengaruhi kehidupan kelompok masyarakat tertentu, khususnya Masyarakat Kabupaten Mamasa. Pemahaman tersebut diperlukan tidak hanya untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang pernah terjadi, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai perubahan sosial yang muncul sebagai akibat dari konflik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya penguatan harmoni sosial, toleransi antar umat beragama, serta pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan damai.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengulas konflik ini sekaligus menjadi tinjauan pustaka penulis dalam merekonstruksi tuluisan ini. Pertama, karya disertasi Mohamad Subhan; *Rivalitas Elit dalam Konflik Etno-Religius: Dinamika Konflik Pemekaran Daerah di Mamasa*. Tulisan ini mengulas secara runut konflik etno-religius di Mamasa dari aspek sosio-politik (Mohamad Subhan, 2018). Kedua, tulisan Mahyuddin dan Muhammad Zaldy Febry yang menjelaskan bagaimana sebuah identitas agama menjadi keterwakilan suara dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari resolusi konflik. Ketiga, Tabah Maryanah (Tabah Maryanah, 2023), yang mengupas konflik pemekaran di Kabupaten Mamasa dengan mengidentifikasikan pihak-pihak yang berkonflik beserta tuntutannya serta peran pemerintah dalam manajemen dan evaluasi konflik. Keempat, tulisan Muhiddin Bakri, dkk. yang mengurai integrasi dan mitigasi konflik keagamaan di Mamasa melalui pendekatan struktural dan kultural (Muhiddin Bakri, dkk, 2024).

Keempat tulisan di atas menyinggung konflik etno-religius di Mamasa, tetapi tidak ada yang membahas secara spesifik dampak konflik terhadap masyarakat Kabupaten Mamasa. Olehnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak konflik etno-religius terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Mamasa dari perspektif sosiologis-historis. Secara khusus tulisan ini berupaya: (1) mendokumentasikan latar dan historis konflik etno-religius di Mamasa dan konteks sosial-politiknya; (2) Mendeskripsikan dinamika konflik yang terjadi; (3) Mengurai dampak konflik pada masyarakat Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi

teoretis pada studi konflik agama-etnis di Indonesia serta rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan lokal, organisasi keagamaan, dan lembaga sosial dalam menyusun program pemulihan, rekonstruksi sosial, dan pencegahan konflik.

METODE

Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan sosio-historis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang, proses, dan perkembangan konflik, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami berbagai perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan umat Islam pasca konflik. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara peristiwa konflik dan dinamika kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Muslim di Kabupaten Mamasa dengan analisis konflik menggunakan teori identitas sosial Henri Tajfel dan John Turner (Jabal Tarik Ibrahim, 2019).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field reseacrh*) yang mencakup wawancara langsung dengan saksi dan pelaku peristiwa, tujuannya untuk memahami fenomena dalam konteks aslinya melalui observasi, wawancara, yang juga didukung beberapa data kepustakaan (*library reseacrh*). Lokasi penelitian berfokus pada dua kecamatan yang ada di Kabupaten Mamasa, yaitu Kecamatan Aralle dan Kecamatan Mambi yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dengan landasan bahwa daerah inilah yang menjadi salah satu pusat perhatian konflik pada saat itu, di samping agar peneliti dengan mudah atau efisien dalam mengumpulkan data terkait pembahasan. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yang mencakup beberapa tahapan seperti kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sirajuddin Saleh, 2023: 138).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Pemekaran Wilayah Kabupaten Mamasa: Awal Mula Konflik

Menurut *Aspinal* dan *Berenschot*, pemekaran wilayah di Indonesia sering kali digunakan sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan dan sumber daya ekonomi di tingkat lokal. Pemekaran tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah, tetapi

juga berbagai aktor politik lokal yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Para elit politik lokal memandang bahwa pembentukan daerah baru adalah kesempatan untuk menguasai sumber daya, menguasai politik dan mendapatkan legitimasi di hadapan masyarakat lokal. Hal tersebut menjadi penyebab keretakan, terutama ketika distribusi kekuasaan dan sumber daya dianggap tidak adil (W. Aspinal & Berenschot, 2019).

Sebagaimana yang dikemukakan Vel, konflik dalam kegiatan pembangunan daerah bermula dari ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu, pemekaran juga dapat memperdalam perpecahan sosial di tengah masyarakat, terutama identitas lokal (seperti etnis atau agama) menjadi faktor penting dalam pembentukan wilayah baru (J. Vel, 2007).

Dalam konteks kabupaten Mamasa, pemekaran tidak hanya mempercepat pembangunan wilayah tetapi juga memicu persoalan identitas yang memperumit hubungan antar kelompok. Konflik seringkali muncul dari upaya satu kelompok untuk mendominasi kelompok lain, baik melalui kontrol ekonomi, pengaruh politik maupun ekspresi budaya. Identitas lokal yang didasarkan pada perbedaan etnis dan agama memperkuat segregasi sosial. Keragaman etnis dan agama yang kaya di Kabupaten Mamasa memiliki tantangan yang signifikan dalam membina kohesi sosial di tengah dinamika konflik ini diiringi dengan berkembangnya demokrasi, menyebabkan tak terbatasnya ruang aspirasi dan ekspresi, termasuk agama, kedaerahan, budaya serta etnis (Tabah Maryanah, 2013).

Konflik ento-religius di Mamasa bukan hal yang baru terjadi pada saat pemekaran wilayah pasca reformasi, tetapi telah terbentuk pada era kolonial. Benih awal konflik bermula saat pemerintah Belanda melakukan pergeseran pusat pemerintahan federasi adat Pitu Ulunna Salu (PUS) yang semula berpusat di Tabulahan dipindah ke Aralle pada tahun 1917 menjadi Onderafdeling. Lalu pada tahun 1924, status pusat onderafdeling dipindah ke Mambi. Pada tahun 1947, status wilayah ini rencananya ditingkatkan menjadi kewedanaan, tetapi musyawarah dari tokoh dan tetua adat tidak mendapat hasil akhir, akhirnya Gubernur Van Celebes yang berkedudukan di Makassar memutuskan dibentuknya Onderafdeling baru yang berkedudukan di Mamasa. Perubahan

status ini menimbulkan ketidakpuasan dari wilayah lain, terutama masyarakat Aralle yang merasa akses dan status politiknya menjadi berkurang. Atas dasar inilah, hulu konflik bermula (Tabah Maryanah, 2013).

Hegemoni pada hierarki sosial masing-masing wilayah adat dalam konsensus Pitu Ulunna Salu (PUS) pada abad ke-15 juga tidak terlepas dari alasan Aralle, Tabulahan, dan Mambi memprotes kebijakan Belanda. Dikutip dalam Mandadung (2005) dan Suhuding (2008,) dalam konsensus ini dijabarkan peran masing-masing wilayah sebagai berikut; (1) Tabulahan sebagai wilayah tertua digelari *indona litaq* atau Pengampu Tanah, memiliki peran sebagai pemegang adat sekaligus pusat peradaban wilayah PUS. (2) Aralle sebagai *indona kada neneq* yang berarti juru bicara PUS. (3) Mambi sebagai *lantang kada neneq*, yaitu pusat tempat permusyawaratan adat PUS. (4) Bambang mendapat julukan *suqbuan adaq*, yaitu penegak hubungan antar wilayah. (5) Rantebulahan dijuluki *tomaqdua takin tomaqtallu sullekka*, yaitu sebagai prajurit-prajurit adat pemberani. (6) Matangnga sebagai *andiri tattempo*, yaitu benteng pertahanan yang berdiri tegak. (7) Tabang sebagai *baka disuraq gandang diroma*, penjaga keutuhan dan kesatuan wilayah PUS (Mohamad Subhan, 2018). Dari konsensus ini, sentimen wilayah tidak terelakkan dalam pemekaran wilayah Kabupaten Mamasa, meskipun ketujuh wilayah ini saling memiliki peran yang krusial dalam menjaga wilayah PUS.

Pasca kemerdekaan, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 34/1952, mengubah status Afdeling Mandar (Polewali, Mamasa, Majene dan Mamuju) menjadi Saerah Swatantra Mandar yang berkedudukan pusat di Majene. Status ini lalu diubah melalui UU 29 tahun 1959 yang memutuskan Afdeling Mandar menjadi Daerah Otonom Tingkat II (Dati II) dibawah Propinsi Sulawesi Selatan dengan tiga kabupaten; Kabupaten Polewali-Mamasa, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju. Walaupun tidak masif, penggabungan dua wilayah (Polewali dengan Mamasa) mendapat penolakan mayoritas masyarakat PUS karena menganggap wilayah Mamasa juga memiliki hak otonomi terpisah dari Polewali, Majene, dan Mamuju. Walau demikian, pembentukan ini tetap berjalan hingga menjadi sebuah kabupaten saat ini.

Lahirnya UU otonomi daerah no. 22 tahun 1999, pasal 1, huruf h: *"Otonomi*

Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (peraturan.bpk.go.id, 2026: 2), merupakan angin segar bagi daerah yang ingin memekarkan diri, termasuk Kabupaten Mamasa. UU ini juga merupakan afirmasi desentralisasi daerah di mana pada masa orde baru yang sentralistik. Pemekaran Kabupaten Mamasa tentu tidak lepas dari kebijakan politik baik dari elit di tingkat nasional hingga elit di lokal/daerah. Menurut Hadiz (2005:241), otonomi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan adanya persaingan kepentingan antarkelompok dalam memperebutkan sumber daya material yang nyata. Dengan demikian, otonomi menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yakni perebutan kekuasaan dan dominasi di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda (Subhan, 2018: 145).

Selain dari aspek historis, salah satu hal utama dalam tuntutan pemekaran Kabupaten Mamasa ialah tuntutan masyarakat akan peningkatan pembangunan, pendekatan dan kemudahan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat. Aspirasi pemekaran ini terus disuarakan oleh seluruh kalangan dan berbagai unsur masyarakat. Pada Juni 1999, diadakan pertemuan di Mambi yang dipimpin Pendeta Zakaria Zude, Fidelis Djawa, Frans Kila, dengan hasil pembentukan susunan panitia pembentukan kabupaten Mamasa dengan Haji Mustapha BA dan Victor Paotonan ditunjuk sebagai ketua dan sekretaris. Terdapat juga tokoh perjuangan pemekaran seperti JD Pualilin, Welem DP, Nurdin lake, dan lainnya. Setelah dilakukan jajak pendapat, terdapat wilayah yang setuju dan tidak setuju. Ketidaksetujuan beberapa wilayah diakibatkan oleh faktor geografis yang wilayahnya lebih dekat dengan Polewali, serta faktor sosio-historis di mana masyarakat ATM merasa bagian dari etnis Mandar yang mayoritas beragama Islam (Mandadung, 2008. Dikutip dalam Subhan, 2018: 127-128).

Perbedaan sikap ini lalu dilanjutkan dalam Pertemuan Matakali pada 20 Mei 2000. Hasilnya, disetujui upaya pemekaran dengan catatan juga menghargai pendapat dari wilayah yang menolak, dalam hal ini masih ingin bergabung dalam Kabupaten Polewali. Adapun desa/kelurahan yang menolak ialah: Kacamatan Pana dengan 3 desa setuju dari

total 14 desa, Kecamatan Sumarorong dengan 5 desa yang setuju dari total 15 desa lainnya, serta Kecamatan Mambi dengan 20 desa yang setuju dari 31 total desa (Mandadung, 2008, 51. Dikutip dalam Subhan, 2018: 135).

2. Polarisasi Konflik: Pro Pemekaran dan Kontra Pemekaran

Seiring dengan Provinsi Sulawesi Barat yang dihembuskan para tokoh Mandar sejak era Orde Lama, mendapat angin segar dari pusat pemerintahan Sulawesi Selatan. Impian ini mendekati kenyataan dengan diselenggarakannya Kongres Sulawesi Barat di Majene pada tahun 2000. Singkatnya, pembentukan Provinsi Sulawesi Barat disetujui tetapi dengan syarat yang harus terpenuhi sesuai regulasi pembentukan daerah otonomi baru, minimal memiliki empat kabupaten. Olehnya, tahun 2001 Kabupaten Mamuju Utara resmi dimekarkan dari kabupaten Mamuju, mengikut Kabupaten Mamasa dari Kabupaten Polewali Mamasa (dan Kota Palopo) dengan diterbitkannya UU nomor 11 tahun 2002. Dari UU inilah, muncul konflik baru beberapa otoritas wilayah di Mamasa, di mana masyarakat Kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi menolak bergabung dengan Kabupaten Mamasa. Perbedaan pandangan ini lalu melahirkan kelompok pro pemekaran yang wilayahnya didominasi pemeluk Kristen dan kepercayaan *aluk mappurondo* dengan mayoritas etnis Toraja, dengan kelompok kontra pemekaran yang wilayahnya dodominasi pemeluk Islam dengan etnis mayoritas Mandar (*Pitu Ulunna Salu*) (Zulkifli Abdullah, 2016 dan Mohamad Subhan, 2018).

Salah satu alasan utama kelompok kontra ialah pemekaran ini tidak mengindahkan Perjanjian Matakali di mana sebagian besar wilayah ATM tidak ingin bergabung. Akibatnya, pada 16 September 2003, sekitar 200 orang yang anti pemekaran di tiga wilayah ATM, melakukan unjuk rasa ke kantor gubernur Sulawesi Selatan dengan tuntutan merevisi UU no. 11 tahun 2002, meskipun hasilnya tetap mengesahkan UU tersebut (Zulkifli Abdullah, 2016). Konflik pemekaran Kabupaten Mamasa bukan sekedar konflik administratif yang tidak hanya disebabkan oleh persoalan batas wilayah mana yang akan masuk ke dalam Kabupaten Mamasa dan wilayah mana yang akan menjadi wilayah Kabupaten Polewali Mandar, akan tetapi, juga terkait dengan politik identitas berbasis etnisitas, agama, dan sejarah wilayah-wilayah di Kapubaten Mamasa (Tabah Maryanah,

2013: 11-12).

Kontestasi elit dan tokoh masyarakat diduga kuat menjadi propaganda yang menumbuhkan benih-benih konflik sosial politik di lingkup kehidupan sosial masyarakat yang kemudian memengaruhi kohesi sosial etnis dan keagamaan masyarakat, yang berujung pada segregasi etnis dan agama. Dua hal ini juga merupakan aspek yang sangat rentan melahirkan konflik horizontal di tengah masyarakat (Mahyuddin dan Muhammad Zaldy Febry, 2023: 115 dan Araiyyah, 2018).

Seiring perkembangannya, konflik ini semakin runyam tatkala tuntutan para masyarakat ATM agar nama kabupaten Mamasa diganti menjadi Kabupaten Pitu Ulunna Salu dan ibu kota kabupaten ditetapkan di Mambi atau Sumarorong namun tidak terealisasi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Benyamin, salah satu tokoh pejuang pemekaran Mamasa; *"Perencanaan awal semua sepakat pemekaran Mamasa. Nanti ada yang tidak setuju setelah selesai penyerahan dan penempatan ibu kota. Pada saat itu ada yang politisir bahwa Mamasa itu wilayah Kristen, di situlah pro dan kontra semakin memanas"* (Dikutip dalam Zulkifli Abdullah, 2016: 97). Akibatnya, para elit mulai memobilisasi massa yang mengangkat kembali semangat primordialisme yakni, beberapa pihak mencoba memprovokasi dengan gesekan perbedaan identitas yang nyata, yaitu perbedaan kultur dan budaya (Andi Hasnul Hasanuddin, 2005. Dikutip dalam (Mahyuddin & Zaldy, 2023). Alhasil, politisasi agama dan perbedaan etnis merupakan unsur yang cukup dominan di Mamasa yang terejawantahkan dalam konflik dan kekerasan terbuka. Tuntutan yang dilemparkan masyarakat ATM untuk pemekaran daerah baru kemudian menyebabkan ketegangan dan keresahan hati kelompok lain.

Namun terlepas dari pemahaman tentang konflik ini, masyarakat ATM hanya dikambing hitamkan oleh para tokoh politik lokal yang memanipulasi masyarakat demi kepentingan mereka. Hal demikian sesuai penjelasan dari bapak Abd. Rahman Syafei yang merupakan seorang tokoh agama di Desa Salumaka Kecamatan Mambi: *"Langkah yang dilakukan orang yang berpolitik, mengatakan kepada masyarakat Muslim bahwa pemekaran ini adalah bentuk diskriminasi."* (Wawancara, 2024).

Hasil wawancara lainnya dengan narasumber yang merupakan seorang tokoh

agama menjelaskan bahwa adanya politik identitas yang memanfaatkan perbedaan etnis dan agama. Hal ini melahirkan istilah konflik etno-religius di Kabupaten Mamasa. Setelah konflik etno-religius yang berbau SARA barulah beberapa oknum mengambil kesempatan di baliknya untuk menjadi pejabat, dengan mempropaganda masyarakat Muslim dalam melakukan unjuk rasa hingga kerusuhan dalam rangka menunjukkan keresahan dan penolakan atas pemekaran wilayah yang telah terjadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Rahman Tona, selaku Kepala Desa Ralleanak:

> *"Kerusuhan ini memang diboncengi oleh politik. Konflik ini tentunya mempunyai propaganda yang luar biasa untuk mengambil kepentingan."* (Wawancara, 2024).

Keterangan di atas juga senada dengan pendapat Bapak Muhammad Said Saggaf sebagai bupati pertama Kabupaten Mamasa yang juga komunitas Mandar yang pro pemekaran sebagaimana dikutip dalam (Zulkifli Abdullah, 2016: 100): "*Sebenarnya secara ekstrim perbedaan etnis dan agama bukanlah faktor utama pemicu konflik. Saya melihat hanya pengaruh elit yang mungkin ada kepentingan dengan Kabupaten Polman (Induk) yang tidak sepenuh hati melepaskan Ara lle, Tabulahan, dan Mambi*".

3. Dampak Konflik Terhadap Kehidupan Masyarakat

Terlepas dari latar konflik yang ditengarai oleh kepentingan politik dan lainnya, konflik ini telah menimbulkan dampak bagi kedua pihak. Korban jiwa pertama sebanyak tiga orang penduduk Sarulinduk yang terjadi di Aralle pada 28 September 2003. Kuat dugaan penyerangan dilakukan oleh kelompok pro pemekaran. Pada 01 Juli 2004, terjadi aksi fisik yang kedua di Mambi antara kedua kubu. Pasca pembentukan Provinsi Sulawesi Barat pada Oktober 2004, situasi kembali memanas saat kelompok pro memasang spanduk di wilayah kontra pemekaran. Insiden ini membuat 47 rumah terbakar dan tiga orang tewas. Suasana tegang ini terus berlangsung hingga tahun 2005 hingga pembicaraan damai diikrarkan (Zulkifli Abdullah, 2016: 90-94).

Dampak lainnya ialah terjadi aksi blokade akses jalan antara kedua kubu. Kelompok pro pemekaran memblokade aktivitas kelompok kontra. Akibatnya, lalu lintas ekonomi ikut terhambat. Seperti yang terjadi di Desa Ralleanak, hal ini disampaikan oleh

informan Maju, mantan guru Madrasah Aliyah di Desa Ralleanak; *"Masyarakat Kristen mengambil tindakan dengan memblokir jalan di beberapa wilayah di Aralle yang notabene penduduk Islam. Titik tersebut sangat vital bagi orang Islam dalam distribusi ekonomi"* (Subhan, 2018 dan Tabah Mariyanah, 2013: 9-10). Pada Juli 2004, *sweeping* dan pemblokiran jalan juga terjadi di perbatasan Mamasa dan Polewali oleh pro pemekaran. Hal ini dibalas oleh penduduk Polewali di perbatasan yang juga memblokade jalan menuju Polewali yang membuat lumpuh aktivitas di wilayah tersebut (Zulkifli Abdullah, 2016: 92).

Instabilitas keamanan ini mengakibatkan pengungsian penduduk secara besar-besaran di kedua kubu. Gelombang pengungsian pertama kali terjadi pada Oktober 2003 di mana sekitar 1000 orang penduduk dari Desa Lakahang dan Lakahang Rea, Kecamatan Tabulahan yang mengungsi ke Kabupaten Mamuju. Selain Mamuju, Kabupaten Polewali juga menjadi tujuan pengungsian bagi kelompok kontra. Hal yang serupa terjadi pada penduduk pro pemekaran yang sebagian besar mengungsi ke wilayah pro pemekaran. Kondisi ini diutarakan Alimuddin, warga asal Mambi yang mengungsi ke Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dengan berjalan kaki.

> *"Saya waktu itu berjalan kaki pergi mengungsi dari Mambi ke Ulumanda. Kami ada sekitar 15 orang baik dari dewasa hingga anak-anak."* (Wawancara, 2004)

Pada aspek pendidikan, seluruh wilayah di kedua kubu lumpuh total. Hal ini bahkan terjadi bertahun-tahun pasca konflik. Perasaan trauma dan beban psikologis menjadi bayang-bayang akan konflik ini. Rustam, salah satu saksi konflik asal Desa Saludurian mengisahkan: *"Sejauh ini dampak negatif tidak bagaiman, hanya pada saat awal konflik berakhir masyarakat Islam seakan ragu dan waspada ketika melintas di wilayah Kristen."* (Wawancara, 2024).

Setelah dilakukan beberapa kali musyawarah dan duduk bersama yang intens pada kedua kubu, akhirnya perdamaian merupakan keniscayaan di Kabupaten Mamasa. Hal ini juga tidak terlepas dari peran tokoh agama, politikus, tokoh adat, dan semua unsur terkait. Menariknya, salah satu hikmah dari konflik ini resolusi konflik pada aspek

keterpilihan kepala daerah (Bupati) ialah menandemkan pasangan dari kubu Muslim dan Kristen sebagai representasi kedua etnis dan agama. Dari awal mekarnya hingga saat ini (2026), kepala daerah Mamasa sering diduetkan dari kedua agama. Berikut tabelnya yang dikutip dalam Mahyuddin dan Muhammad Zaky, 2023.

Tabel 1 Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa

Bupati	Wakil Bupati	Mulai Jabatan	Kombinasi Agama
M. Said Saggaf	Victor Paotonan	2003	Islam dan Kristen
Obed Nego Depparinding	Ramlan Badawi	2008	Kristen dan Islam
Ramlan Badawi	-	2011	Islam
Ramlan Badawu	Victor Paotonan	2013	Islam dan Kristen
Ramlan Badawi	Bonggalangi	2016	Islam dan Kristen
Ramlan Badawi	Marthinus Tiranda	2018	Islam dan Kristen
Welem Sambolangi	Sudirman	2025	Kristen dan Islam

KESIMPULAN

Konflik etno-religius merupakan fenomena sosial yang muncul akibat interaksi kompleks antara perbedaan identitas etnis, agama, kepentingan sosial, politik, dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pemekaran Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, persoalan konflik etno-religius perlu dipahami melalui pendekatan sosio-historis dengan memperhatikan perkembangan hubungan antar kelompok masyarakat, dinamika kehidupan keagamaan, serta perubahan sosial dan politik yang berlangsung dari waktu ke waktu.

Konflik yang melibatkan identitas etnis dan agama tidak hanya berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan antarkelompok, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti melemahnya solidaritas sosial, berkurangnya rasa saling percaya, terganggunya aktivitas ekonomi, serta munculnya prasangka dan sikap eksklusif terhadap kelompok lain. Dampak tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang apabila konflik tidak diselesaikan secara adil dan menyeluruh. Oleh karena itu, kajian mengenai konflik etno-religius di Mamasa perlu mempertimbangkan kondisi historis, struktur sosial, hubungan antarkomunitas, serta peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah dalam mengelola perbedaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik etno-religius dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Mamasa merupakan persoalan yang perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dimensi sejarah, sosial, budaya, agama, dan politik. Pemahaman terhadap akar konflik dan konsekuensinya diharapkan dapat menjadi dasar untuk membangun rekonsiliasi, memperkuat integrasi sosial, serta mewujudkan kehidupan masyarakat Mamasa yang damai, inklusif, dan harmonis. Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup diwujudkan melalui penghentian konflik, tetapi harus disertai upaya berkelanjutan untuk memulihkan kepercayaan, mempererat solidaritas, dan membangun hubungan yang setara di antara seluruh kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. Zulkifli. (2016). Kontestasi Elit Lokal dalam Konflik Politik Pemekaran Daerah (Studi Kasus Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat). *Magister Manajemen Pembangunan Sosial Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia*.

H. Hamdar Arraiyyah & H. Nahar Nahrawi. (2018). *Menuju Damai dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik di Aralle, Tabulahan dan Mambi). Al-Qalam* 11(2). No.XVI Tahun XI Edisi Juli-Desember.

Iqbal. Imam.(2017). Konflik Etno-Religius di Indonesia Kontemporer dalam

Pandangan Orde Baru. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9(1). http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh

LIPI. (2006). *Kekerasan komunal: anatomi dan resolusi konflik di Indonesia*. Yogyakarta: LIPI. ISBN: 979 2458 64 6

Mahyuddin dan Muhammad Zaldy Febry. (2023). Representasi Identitas Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagi Media Resolusi Konflik Etnoreligius di Mamasa. *Palita: Jurnal of Social Religion Research* 8(1). http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita DOI: http://10.24256/pal.v8i1.3587

Maryanah, T. (2013). Governance Dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, *4*(1), 7-16.

Muhidin Bakri, dkk. (2024). Merenden Tedong di Mamasa: Integrasi Pendekatan Struktural dan Kultural dalam Memitigasi Konflik Sosial Keagamaan. *Palita: Journal f Social Religion Research* 8(1). *http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita DOI: http://10.24256/pal.v9i2.5220*

peraturan.bpk.go.id, (2026).

Saleh. Sirajuddin. (2023). Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula. *Gowa, Agma*. ISBN: 978-623-6821-54-1

Subhan. Mohamad. (2018). Rivalitas Elit dalam Konflik Etno-Religius: Dinamika Konflik Pemekaran Daerah di Mamasa, *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Departemen Sosiologi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia*.

Tarik Ibrahim. J. (2019). *Sosiologi Pedesaan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

W. Aspinall & Berenschot (2019). Democracy of Sale: Elections, Clientelism, and State in Indonesia. *Cornell University Press*.

Abd. Rahman Syafei, Warga Desa Salumaka (Wawancara, 2024)

Abdul Rahman Tona, Kepala Desa Ralleanak (Wawancara, 2024)

Alimuddin, Warga Desa Mambi, Wawancara (2024).

Rustam, Warga Desa Saludurian, Wawancara (2024).